

**KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
BUNGUS, SUMATERA BARAT (2001- 2017)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Strata 1 (S1) Pada Program Studi Pendidikan Sejarah*



Oleh

PUTI LINDO JATI

14046079

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

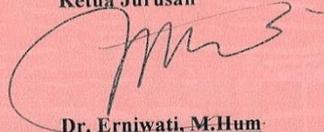
KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
BUNGUS, SUMATERA BARAT (2001- 2017)

Nama : Puti Lindo Jati
BP/NIM : 2014/14046079
Jurusan : Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 14 Februari 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

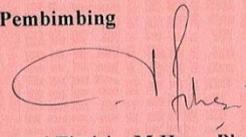


Dr. Erniwati, M.Hum

NIP. 197104061998022001

Disetujui oleh:

Pembimbing



Azmi Fitrissia, M.Hum, Ph. D

NIP. 197103081997022001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS

UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Ujian Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Skripsi**

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang pada Tanggal 14 Februari 2019

**KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
BUNGUS, SUMATERA BARAT (2001- 2017)**

Nama : Puti Lindo Jati
BP/NIM : 2014/14046079
Jurusan : Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 14 Februari 2019

Tim Penguji

Ketua : Azmi Fitriisa, M.hum, Ph. D

Anggota : 1. Hendra Naldi, SS, M.Hum

2. Dr. Etmi Hardi, M. Hum

Tanda Tangan

1. 

2. 

3. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

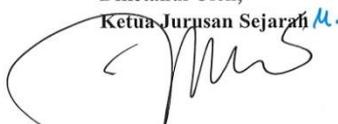
Nama : Puti Lindo Jati
TM/Nim : 2014/14046079
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Sumatera Barat (2001-2017)**”, adalah hasil karya sendiri bukan hasil plagiat dari orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti cara penulisan ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 14 Februari 2019

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Sejarah *M.*


Dr. Erniwati, SS, M.Hum
NIP.197104061998022001

Saya yang menyatakan,

Puti Lindo Jati
NIM. 14046079

ABSTRAK

Puti Lindo Jati : NIM 14046079/2014. *Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Sumatera Barat(2001-2017)*. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2018.

Skripsi ini membahas tentang Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang merupakan salah satu dari enam buah pelabuhan perikanan samudera yang ada di Indonesia. Sebelum menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus awalnya berstatus Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus. Perubahan status pelabuhan perikanan tersebut berdasarkan SK Mentan No. 261 Mentan/2001. Dalam melaksanakan kinerja operasional pelabuhan perikanan, yang harus diperhatikan adalah apa yang menjadi sasaran, tujuan, misi dan visi pelabuhan perikanan tersebut. Kinerja operasional PPS Bungus meliputi : administrasi dan tenaga kerja, akomodasi pelabuhan, investor, produksi ikan, kunjungan kapal perikanan dan infrastruktur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap. Pertama proses pengumpulan data, penulis memperoleh sejumlah arsip dan data tentang laporan tahunan dan laporan statistik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dari Kantor PPS Bungus. Selain itu penulis juga memperoleh data lisan yang diperoleh dari hasil observasi di PPS Bungus dan wawancara dengan informan yang berjumlah 9 orang. Selain data primer, penulis juga memperoleh sejumlah data dari manuskrip, jurnal, maupun buku-buku yang relevan. Pada tahapan kritik, penulis membandingkan sejumlah data yang telah diperoleh dan menyingkirkan data yang tidak relevan. Selanjutnya penulis menafsirkan berbagai sumber sejarah tadi untuk dipersiapkan pada tahap akhir. Pada tahap akhir penulisan dilakukan dalam bentuk skripsi sesuai dengan panduan tugas akhir Universitas Negeri Padang.

Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dari tahun 2001-2017 masih belum optimal, hal ini berdasarkan beberapa faktor yaitu: produksi ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum mencapai target yang telah ditentukan, kegiatan perikanan di Pelabuhan Samudera Bungus masih tergolong tidak ramai, karena kapal-kapal perikanan masih sedikit yang melakukan pendaratan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dan fasilitas yang ada di pelabuhan Perikanan Samudera Bungus masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Kata Kunci : Kinerja, Operasional, Pelabuhan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat dan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Sumatera Barat (2001- 2017)”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, masukan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : (1) Ibu Dr. Erniwati, M.Hum sebagai ketua jurusan sejarah, (2) Ibu Azmi Fitriisia, M.Hum, Ph.D sebagai dosen pembimbing dan selaku penasehat akademis, (3) Bapak Hendra Naldi, SS, M.Hum sebagai dosen penguji I, (4) Bapak Drs. Etni Hardi, M.Hum sebagai dosen penguji II, (5) seluruh bapak ibu staf pengajar jurusan Sejarah, (6) seluruh informan penelitian yang telah banyak memberikan informasi untuk penulisan skripsi ini, (7) kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Indra Zulfrinaldi, Ibunda Nurleli dan adik tercinta Malahayati, serta juga keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangat dan (8) terima kasih kepada teman-teman jurusan angkatan 2014 terkhusus buat dua sahabat karib saya Dewi Oriza Sativa dan Wahyuni yang bersedia memberi semangat dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Atas perhatian pembaca, penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, 24 Desember2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR BAGAN	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
GLOSARIUM (ISTILAH)	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Kepustakaan	8
a. Kajian Terdahulu.....	8
b. Kerangka Konseptual	12
c. Kerangka Berpikir	20
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II. GAMBARAN UMUM PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	
A. Lokasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	24
B. Sejarah Berdirinya PPS Bungus (1981-1989).....	25
C. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	28
D. Fungsi dan Peranan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	30
E. Struktur Organisasi PPS Bungus	34

F. Orang-orang (aktor) yang terlibat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	40
G. Kinerja Operasional PPS sebelum tahun 2001.....	42
BAB III. KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS2001-2017	
A. Administrasi dan Tenaga Kerja PPS Bungus.....	50
B. Akomodasi Pelabuhan PPS Bungus.....	58
a. Penyaluran Air Bersih.....	58
b. Penyaluran BBM.....	59
c. Penyaluran Es.....	61
C. Investor.....	62
D. Produksi Ikan di PPS Bungus.....	65
E. Kunjungan Kapal Perikanan di PPS Bungus.....	67
F. Infrastruktur.....	69
a. Fasilitas PPS Bungus.....	69
b. Pelaksanaan K3.....	75
G. Faktor Lambatnya Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	77
BAB IV. KESIMPULAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85
DAFTAR LAMPIRAN.....	89

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2009- 2013.....	36
Bagan 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2014- 2017.....	39
Bagan 3. Struktur Organisasi PPS Bungus	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Produksi Ikan dan Nilai Produksi Ikan dari Tahun 1991-2000.....	44
Tabel 2. Jumlah kunjungan kapal yang mendarat di PPN Bungus	46
Tabel 3. Fasilitas Sarana dan Prasarana di PPN Bungus (1991- 2000)	48
Tabel 4. Penerimaan PNBPN di PPS bungus Tahun 2008- 2017.....	52
Tabel 5. Sumber Dana Kegiatan di PPS Bungus DIPA Tahun 2012- 2017	53
Tabel 6. Jumlah Pegawai PPS Bungus dari Tahun 2010- 2017.....	55
Tabel 7. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Perjalanan Dinas dari Tahun 2012-2015	57
Tabel 8. Volume dan Nilai Penyaluran Air Bersih di PPS Bungus Tahun 2011-2017	58
Tabel 9. Penyaluran BBM (solar) Tahun 2011- 2017.....	60
Tabel 10. Penyaluran Es PT. Danitama Tahun 2011- 2017	61
Tabel 11. Daftar Investor dan Lahan Industri Perikanan yang dimanfaatkan	63
Tabel 12. Jumlah Ikan yang Didaratkan dan Nilai Produksi Ikan di PPS Bungus Dari Tahun 2005- 2017	66
Tabel 13. Jumlah Kunjungan Kapal Perikanan di PPS	67
Tabel 14. Fasilitas Pokok Kawasan PPS Bungus	69
Tabel 15. Fasilitas Fungsional Kawasan PPS Bungus	71
Tabel 16. Fasilitas Penunjang Kawasan PPS Bungus.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Produksi Ikan di PPS Bungus	78
Gambar 2. Grafik Produksi Ikan di PPS Bungus	79
Gambar 3. Jumlah Nelayan di PPS Bungus	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto tentang Kondisi dan Pegawai PPS Bungus	90
Lampiran 2. Brosur tentang Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	97
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	99
Lampiran 4. Surat Rekomendasi	100

GLOSARIUM

- Ikan*** : Salah satu jenis binatang yang hidup di air
- Kapal Perikanan*** : Merupakan sebuah kapal yang berfungsi sebagai penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pengangkutan hasil ikan.
- Kebijakan*** : Merupakan pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak yang diterapkan oleh pemerintahan dan organisasi.
- Kesyahbandaran*** : Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan kegiatan operasional kapal perikanan.
- Kinerja*** : Gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan untuk mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi
- Kolam Pelabuhan*** : Perairan yang ada di dermaga yang berfungsi untuk kegiatan sandar kapal maupun olah gerak kapal perikanan.
- Lembaga*** : Suatu aturan yang dikenal dan diikuti oleh masyarakat

- Nelayan*** : Orang yang mencari pendapatan dengan menangkap ikan
- Pelabuhan*** : Tempat berlabuhnya kapal- kapal untuk berbagai kepentingan seperti, menghindar dari bahaya alam, beristirahat, untuk kepentingan perdagangan, dan sebagainya.
- Pelabuhan Perikanan*** : Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas- batas tertentu yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang perikanan.
- PPS*** : Pelabuhan perikanan tipe A atau kelas I
- PPN*** : Pelabuhan perikanan tipe B kelas II
- PPP*** : Pelabuhan perikanan yang menampung kapal perikanan yang beroperasi di pantai
- PPI*** : Pelabuhan kecil yang umumnya dikelola oleh daerah, untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di daerah pantai
- Usaha Perikanan*** : Semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan perikanan memegang peranan yang strategis dalam pengembangan usaha perikanan maupun pengembangan masyarakat nelayan. Pelabuhan perikanan merupakan pusat aktivitas masyarakat perikanan yang di dalamnya terdapat interaksi antar kelompok masyarakat perikanan seperti adanya nelayan, pengusaha penangkapan ikan, dan lainnya .¹

Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi dan telah memiliki lembaga pengelola pelabuhan perikanan dapat ditetapkan kelasnya berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional (Menteri Perikanan dan Kelautan 2008).² Pelabuhan perikanan diklasifikasikan menjadi Pelabuhan PerikananSamudera

¹Dalam I Solihin, *Pola dan Karakteristik Distribusi Hasil Tangkapan di PPN Pelabuhan Ratu*, (Bogor : IPB, 2003). Suci Asrina Ikhsan. “Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Padang sebagai Pusat Pendaratan Ikan Tuna di Perairan Sumatera Bagian Barat”. *Tesis*. (Bogor, Sekolah pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2017), hlm. 1.

² Menteri Kelautan dan Perikanan. 2008. PER.08/MEN/2012 tentang pelabuhan Perikanan

(PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).³

Pelabuhan Perikanan Samudera di Indonesia hanya terdapat enam buah, yaitu: *pertama*, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Cilacap dimulai tahun 1991 dan selesai pada tahun 1994. Uji coba operasional dilakukan pada tanggal 20 Mei 1994 sampai dengan 24 Mei 1995. Pada tanggal 18 November 1996 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap diresmikan.⁴ PPS Cilacap ini dikenal mempunyai sumber daya ikan cukup melimpah terutama ikan pelagis besar dan kecil serta udang.⁵

Kedua, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dibangun sejak tahun 1984, sedangkan operasional PPS Kendari dimulai pada tahun 1990 setelah diresmikan oleh Presiden RI Bapak H.M.Soeharto pada tanggal 10 September 1990.⁶ PPS Kendari merupakan basis utama perikanan laut di wilayah Sulawesi Tenggara dan kawasan Timur Indonesia, dengan daerah penangkapannya yaitu Laut Flores, Selat Makasar, Laut Banda, Laut Arafuru dan Laut Maluku yang potensi sumberdaya ikannya adalah jenis ikan pelagis, gurita dan sotong.⁷ *Ketiga*, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 25 Desember 1975 Nomor : P B/W 30/13/75 ditetapkan Gabion-Belawan sebagai lokasi khusus

³*Ibid*

⁴Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Pusat Infotrmasi Pelabuhan Perikanan", (<http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil-pelabuhan/1167/informasi>, diakses 18 September 2018, 11.09 WIB)

⁵ Frizka Priyona, "Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai Sentra Tuna di Wilayah Indoonesia Bagian Barat (2006-2015)", *Skripsi Program Studi Sejarah* (Padang, Universitas Negeri Padang, 2016), hlm. 13.

⁶Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Op. Cit*

⁷Frizka Priyona, *Op. Cit*. hlm. 14

bagi kapal-kapal perikanan.⁸*Keempat*, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta. Perencanaan pembangunan PPS Nizam Zachman dimulai sejak tahun 1972. PPS Nizam Zachman mulai dibangun tahun 1980 dengan pembiayaan bantuan lunak pemerintah Jepang melalui Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) dan dana APBN. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia serta menjadi kawasan industri.⁹

Kelima, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Pembangunan PPS Bitung dicanangkan pada tanggal 18 Juli 2001 oleh Presiden RI Abdulrahman Wahid. Pembangunan dimulai pada tahun 2002. Tanggal 10 Desember 2005 ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Bitung melalui SK. Menpan No.B/2712/M.Pan/12/2005 dan Peningkatan status PPN Bitung menjadi PPS Bitung pada tanggal 06 Oktober 2008 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.19/MEN/2008.¹⁰

Keenam, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Pelabuhan ini terletak di Teluk Bungus, Kelurahan Labuhan Tarok, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Kelurahan Labuhan Tarok ini berjarak 16 km dari Kota Padang dan 42 km dari Pelabuhan Udara Internasional Minangkabau. Sejarah PPS Bungus diawali dari Proyek Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Sumatera atau lebih dikenal dengan nama “Sumatera Fisheries

⁸Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan”, (<http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil-pelabuhan/1295/informasi>, diakses 4 Oktober 2018, 20.22 WIB)

⁹Trisna Ningsih, “Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman”, *Tesis*. (Bogor, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2006), hlm. 39

¹⁰Karim Anwar, “Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung”, (<http://penyuluhanppsbitung2.blogspot.com/2017/02/pelabuhan-perikanan-samudera-bitung.html>, diakses 4 Oktober 2018, 20.39 WIB)

Development Project” (SFDP). SFDP menemukan tempat yang cocok untuk pengumpulan ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan. Daerah yang dipilih adalah Bungus Teluk Kabung. Kawasan ini dipilih karena memiliki dasar laut cukup dalam, dan daerah Bungus Teluk Kabung ini daerahnya cukup luas.¹¹ Proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sudah ada sejak tahun 1985 dan selesai tahun 1989 dengan sumber dana berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB Loan 474-INO) sebesar US\$ 9,3 Juta dan dana pendamping setiap Tahun Anggaran dari APBN.¹²

Kinerja operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meliputi, administrasi dan tenaga kerja, akomodasi pelabuhan, investor, produksi ikan, kunjungan kapal perikanan dan infrastruktur.¹³ Dalam melaksanakan kinerja operasional pelabuhan perikanan yang harus diperhatikan adalah apa yang menjadi sasaran, tujuan, misi dan visi pelabuhan tersebut dapat tercapai yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang pelabuhan Perikanan.

Akan tetapi dalam perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus memiliki berbagai permasalahan dalam kinerja operasional pelabuhan, seperti : *pertama*, jumlah kunjungan armada kapal yang melakukan bongkar muat ikan di PPS Bungus.¹⁴ *Kedua*, Sekitar tahun 2004-an kapal tonda maupun kapal

¹¹Aldian Syofianda, “Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (1985-2009)”, *Skripsi Program Studi Sejarah* (Padang, Universitas Andalas, 2013), hlm. 2

¹²Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Pusat Infotrmasi Pelabuhan Perikanan”, (<http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil-pelabuhan/1169/informasi>, diakses 4 Oktober 2018, 20.22 WIB)

¹³Wawancara dengan Syahromadan (Kepala Seksi Operasional PPS Bungus), tanggal 1 Oktober 2018 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bugus.

¹⁴Kunjungan kapal di PPS Bungus antara tahun 1991- 1998 mengalami kenaikan. Semenjak tahun 1999- 2015 jumlah kunjungan kapal di PPS Bungus mengalami kenaikan maupun penurunan. Peningkatan jumlah kunjungan kapal yang pesat terjadi pada tahun 2007, 2011-

bagan yang ada di PPS Bungus dipindahkan ke Pelabuhan Muara, Padang, sehingga di PPS Bungus ini kapal-kapal ikannya sedikit yang mengakibatkan aktifitas perikanan sedikit. **Ketiga**, Sulit mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak karena tergantung dari hasil melaut nelayan dan kedatangan kapal. **Keempat**, Optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang masih rendah seperti dermaga dan kolam pelabuhan yang belum optimal dimanfaatkan. **Kelima**, Menurut para investor yang akan membuka usaha, di PPS Bungus ini ada preman. Tetapi setelah para pegawai PPS Bungus meninjau tentang masalah tersebut ke lapangan, preman yang dimaksud adalah bukan seperti preman yang pada umumnya tetapi jika ada kapal yang datang ke PPS Bungus harus melalui agen. Agennya harus warga sekitar, dimana warga sekitar meminta bayaran yang lebih mahal dibandingkan dengan agen-agen yang lain.¹⁵

Penulis menganggap penulisan ini sangat penting untuk dilakukan yang dengan alasan. **Pertama**, aktifitas perikanan di PPS Bungus masih rendah dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang lain.¹⁶ **Kedua**, Pelabuhan perikanan samudera yang ada di Indonesia ini hanya ada enam buah,

2015. Sedangkan pada tahun 2009- 2010 jumlah kunjungan kapal di PPS Bungus mengalami penurunan akibat adanya peristiwa gempa bumi.

¹⁵Wawancara dengan Irvan Armana (Kasie Kesyahbandaran), tanggal 9 Agustus 2018 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

¹⁶ Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan pelabuhan yang memiliki jumlah produksi ikan terkecil di antara beberapa pelabuhan. Urutan Jumlah Produksi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yaitu nomor lima terkecil dari enam buah Pelabuhan Perikanan Samudera yang ada di Indonesia. Jumlah produksi ikan yang kecil terlihat dari jumlah frekuensi kunjungan kapal maupun jumlah kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya. Urutan **pertama** yang memiliki jumlah paling besar dalam kunjungan kapal berdasarkan periode Bulan Agustus- Oktober 2018 yaitu PPS Cilacap (1.196 kapal). **Kedua**, yaitu PPS Bitung (1.176 kapal). **Ketiga**, PPS Kendari (974 kapal). **Kelima**, PPS Bungus (365 kapal). **Keenam**, PPS Belawan (244 kapal) . Berdsarkan sumber : PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan)

yaitu Belawan, Bungus, Jakarta, Cilacap, Kendari dan Belitung.¹⁷**Ketiga**, Pada tahun 2011 dan 2012, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus ini ditetapkan sebagai kawasan inti minapolitan dibidang perikanan tangkap dan sebagai kawasan industrialisasi perikanan tangkap. **Keempat**, perputaran uang yang ada di PPS Bungus ini tinggi, karena di PPS Bungus sistem pembelinya itu “pilih”. **Kelima**, perputaran uang di PPS Bungus ini tergolong lambat.¹⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh tentang **“Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (2001- 2017)”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2001- 2017 ?
2. Mengapa perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus lambat?

Batasan temporalnya adalah 2001- 2017. Tahun 2001 diambil sebagai batasan awal karena pada tahun 2001 merupakan penetapan status pelabuhan perikanan yang awalnya berstatus pelabuhan perikanan nusantara menjadi pelabuhan perikanan samudera. Batasan akhir penelitian ini adalah tahun 2017,

¹⁷Wawancara dengan Bayu Eko Wibowo (Kasubag Umum PPSB), tanggal 19 Mei 2017 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

¹⁸ *Op. Cit*, wawancara.

hal ini karena pada tahun 2017 ini jumlah kunjungan kapal dan produksi ikan mengalami penurunan yang drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Batasan spasialnya adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terletak di Teluk Bungus, Kelurahan Labuhan Tarok, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Kelurahan Labuhan Tarok ini berjarak 16 km dari Kota Padang dan 42 km dari Pelabuhan Udara Internasional Minangkabau.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui kinerja operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2001- 2017
2. Untuk mengetahui Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang masih lambat

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori, penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah melalui penelitian yang akan dilakukan
2. Secara praktis, bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai perkembangan dan permasalahan di PPS Bungus dari tahun 1989- 2017, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan yang ada di PPS Bungus, sehingga PPS Bungus menjadi lebih maju, dan menambah khasanah tentang kajian sejarah maritim.

E. Tinjauan Kepustakaan

a. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah informasi dasar rujukan yang akan digunakan penulis dalam penelitian tentang “ Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Sumatera Barat”. Adapun penelitian dan tulisan- tulisan yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

Buku tentang “Profil Daerah Kota Padang 2010 (Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota Padang)” halaman 124-127, dijelaskan tentang “Kelautan dan Perikanan”. Kota Padang memiliki perairan laut seluas 720 km² dengan panjang pantai 68,126 km. Pantai dan perairan kota Padang memiliki kekayaan laut yang potensial seperti keanekaragaman jenis ikan laut, jenis-jenis tumbuhan laut, bunga karang, dan lain sebagainya¹⁹. Pemerintah kota Padang secara bertahap memperbaharui potensi perikanan dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung. Pemko Padang membuat PPI Muara Anai untuk melengkapi sarana dan prasarana Pelabuhan Samudera Bungus. Fasilitas yang tersedia pada Pelabuhan Perikanan Bungus meliputi : kolam pelabuhan, dermaga, perbengkelan, pabrik es, dan fasilitas penunjang (kantor,dll). Di samping itu, terdapat juga beberapa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mini, yaitu di Pasir Jambak, Gaung dan Batung²⁰. Buku ini sangat relevan dengan penelitian yang saya buat, karena isi di dalam buku ini juga ada menjelaskan tentang kondisi PPS Bungus, baik itu sarana dan prasarananya.

¹⁹Tim Penyusun, *Profil Daerah Kota Padang (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang)*, (Padang : Pemerintah Kota Padang, 2010), hlm. 124-125

²⁰*Ibid*, hlm.126-127.

Cristine Dobbin. 1992. *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang sedang Berubah, Sumatera Tengah, 1784- 1847*. Jakarta : INIS. Dalam karyanya ini, Dobbin menguraikan aspek aspek sosial budaya daerah tersebut. Desa pantai dan perikanan pukat sklala kecil di Bungus juga disinggung, meski tidak satupun diungkapkan dengan mendetail tentang Pelabuhan Perikanan Bungus. Hanya saja Dobbin menyebutkan bahwa penangkapan ikan di Bungus sangat terorganisir, walau tidak pernah berkembang melampaui skala kecil. Dobbin menyatakan daerah itu memiliki alat tangkap yang beragam.²¹

Aldian Syofianda. 2013. *Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (1985-2009)*. Skripsi . Padang : Prodi Ilmu Sejarah. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Andalas. Fokus penelitiannya yaitu perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mulai dari awal Proyek Pembangunan Pengembangan Ikan Sumatera, menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara sampai menjadi Pelabuhan Samudera yang merupakan kelas pelabuhan tertinggi di Indonesia, dan kehidupan sosial masyarakat Bungus sebelum dan setelah berdirinya Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.²²

Meri Yulianti dalam skripsinya yang berjudul “ Aktivitas Nelayan di Sekitar Pelabuhan Muara Kota Padang 1970- 2004”, yang menjelaskan aktivitas masyarakat nelayan di Pelabuhan Muara Batang Arau. Dimulai dari kegiatan penangkapan ikan, kemudian alat penangkapan ikan dan jaringan perdagangan

²¹Dalam Cristine Dobbin, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Pantai yang sedang Berubah, Sumatera Tengah, 1784- 1847*. (Jakarta : INS, 1992), hlm. 56. Aldian Syofianda, “Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (1985-2009)”.*Skripsi Program Studi Sejarah* (Padang, Universitas Andalas, 2013), hlm. 7.

²²Aldian Syofianda, *Ibid* , hlm. 10

ikan di Pelabuhan Muara ditentukan oleh agen, serta adanya tempat pelelangan ikan.²³

Suci Asrina Ikhsan. 2017. *Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Padang sebagai Pusat Pendaratan Ikan Tuna di Perairan Sumatera Bagian Barat*. Tesis (online). Bogor : Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Fokus penelitiannya yaitu, tentang Mengevaluasi kinerja operasional PPS Bungus sebagai pusat pendaratan ikan tuna di perairan Sumatera Bagian Barat dan permasalahan yang ada di PPS Bungus.²⁴

Trisna Ningsih. 2006. *Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman*. Tesis (online). Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Fokus penelitiannya yaitu, tentang kelembagaan atau organisasi PPS Nizam Zachman, Faktor-faktor apa saja yang menentukan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan PPS Nizam Zachman dan Strategi apa yang diperlukan dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PPS Nizam Zachman.²⁵

Frizka Priyona. 2016. *Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai Sentra Tuna di Wilayah Indoonesia Bagian Barat (2006-2015)*. Skripsi. Pogram Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Fokus penelitiannya yaitu, bagaimana perkembangan

²³Meri Yulianti, "Aktivitas Nelayan di Sekitar Pelabuhan Muara Kota Padang (1970-2004)", *Skripsi Program Studi Sejarah*, (Padang, Universitas Andalas, 2005), hlm. 3.

²⁴Suci Asrina Ikhsan, "Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Padang sebagai Pusat Pendaratan Ikan Tuna di Perairan Sumatera Bagian Barat", *Tesis*, (Bogor, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2017), hlm. 5.

²⁵Trisna Ningsih, "Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman", *Tesis* (Bogor, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor., 2006), hlm. 7.

produksi ikan tuna ekspor di PPS Bungus sejak tahun 2006-2017 dan bagaimana dampak penetapan PPS Bungus sebagai sentra tuna di wilayah Indonesia bagian barat.²⁶

Reny Yuliasuti. 2010. *Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat*. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institusi Pertanian Bogor. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu, Kinerja operasional PPN Palabuhan Ratu dikatakan cukup baik. Hal ini dilihat dari jumlah produksi ikan dan kunjungan kapal, sedangkan untuk penyediaan fasilitas dan kualitas pelayanan masih kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan PPN Palabuhan Ratu selanjutnya harus lebih memperhatikan penyediaan fasilitas dan kualitas pelayanan.²⁷

Suci Asrina Ikhsan, dkk. “*Strategi Pengembangan Pelabuhan Samudera (PPS) Bungus, Padang, Sumatera Barat ditinjau dari Aspek Produksi*”. *Jurnal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. 2015. Volume 4 Nomor 2. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Fokus penelitian pada jurnal ini yaitu, menganalisis kondisi fasilitas dasar, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang, menganalisis tingkat pemanfaatan dan kebutuhan fasilitas

²⁶ Frizka Priyona, “Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai Sentra Tuna di Wilayah Indoonesia Bagian Barat (2006-2015)”, *Skripsi* (Padang, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2016), hlm. 15.

²⁷Reny Yuliasuti, “ Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat”. *Skripsi* (Bogor, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institusi Pertanian Bogor, 2010), hlm . 2.

dasar, fungsional serta melakukan analisa strategi pengembangan PPS Bungus ditinjau dari aspek produksi.²⁸

Yuspardianto. “*Studi Fasilitas Pelabuhan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sumatera Barat*”. Jurnal Mangrove dan Pesisir. 2006. Volume 5 Nomor 1. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta. Fokus penelitian pada jurnal ini yaitu, kajian terhadap fasilitas pelabuhan perikanan Samudera Bungus agar Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat berjalan secara profesional dan rasional demi kesejahteraan dan peningkatan pendapatan nelayan khususnya peningkatan pendapatan daerah Sumatera Barat pada umumnya.²⁹

b. Kerangka Konseptual

1) Pelabuhan

Secara harfiah pelabuhan merupakan tempat berlabuhnya kapal-kapal untuk berbagai kepentingan seperti menghindar dari bahaya alam, beristirahat, untuk kepentingan perdagangan, dan kepentingan lainnya. Dari segi ekonomi pelabuhan merupakan tempat bertemunya pelaut dan pedagang dari seberang dengan pelaut dan pedagang setempat.³⁰

²⁸Suci Asrina Ikhsan, dkk, “Strategi Pengembangan Pelabuhan Samudera (PPS) Bungus, Padang, Sumatera Barat ditinjau dari Aspek Produksi”, (*Jurnal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. 2015. Volume 4, Nomor 2), hlm. 69.

²⁹Yuspardianto, “Studi Fasilitas Pelabuhan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sumatera Barat”, (*Jurnal Mangrove dan Pesisir*. 2006. Volume 5, Nomor 1), hlm. 47.

³⁰Dalam Singgih Tri Sulistiyono, *Pengantar Sejarah Maritim Indonesia* (Jakarta : DIKTI, 2004. hlm. 120).Frizka Priyona, “Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai Sentra Tuna di Wilayah Indoonesia Bagian Barat (2006-2015)”, *Skripsi*. (Padang, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2016), hlm. 19.

2) Pelabuhan Perikanan

Sesuai dengan Pasal 1 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Menurut Lubis (2000) pelabuhan perikanan adalah merupakan pusat pelabuhan perikanan adalah merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran baik berskala lokal, nasional maupun internasional.³¹

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1994) bahwa aspek-aspek tersebut secara rinci adalah :

- a) Produksi: bahwa pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksinya, mulai dari memenuhi kebutuhan perbekalan untuk menangkap ikan di laut sampai membongkar hasil tangkapannya.
- b) Pengolahan: bahwa pelabuhan perikanan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapannya.
- c) Pemasaran: bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengumpulan dan pemasaran hasil tangkapannya.³²

³¹Dalam E Lubis, *Pengantar Pelabuhan Perikanan (Buku I)*, (Bogor : Jurusan PSP. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor, 2000).Trisna Ningsih, “Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman”, *Tesis* (Bogor, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2006), hlm. 11.

³²*Ibid*, hlm. 11.

3) Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan, dimana pelabuhan perikanan dapat dikategorikan menurut kapasitas dan kemampuan masing-masing pelabuhan untuk menangani kapal yang datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan. Pelabuhan perikanan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori utama yaitu³³ :

a) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)

PPS dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan tipe A atau kelas I. Terdapat 5 (lima) PPS di Indonesia, yaitu PPS Nizam Zachman di DKI Jakarta, PPS Cilacap di Jawa Tengah, PPS Belawan di Sumatera Utara, PPS Bungus di Sumatera Barat dan PPS Kendari di Sulawesi Tenggara. PPS adalah pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal perikanan yang mempunyai kemampuan beroperasi di samudera dan lepas pantai yang sifatnya nasional dan internasional, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1.1. Terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran > 60 GT.
- 1.2. Melayani kapal perikanan yang beroperasi di perairan lepas pantai, ZEE dan perairan internasional.
- 1.3. Dapat menampung 100 buah kapal perikanan atau 6.000 GT sekaligus.
- 1.4. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 200 ton/hari atau 40.000 ton/tahun.
- 1.5. Memiliki \pm 30 Ha lahan untuk kawasan industri perikanan.
- 1.6. Memberikan pelayanan ekspor industri perikanan.

³³Trisna Ningsih, *Op. Cit* , hlm. 13-15.

b) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

PPN dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan tipe B atau kelas II. Terdapat 11 (sebelas) PPN di Indonesia, dimana lokasinya berada di Brondong 14 (Jawa Timur), Sibolga (Sumatera Utara), Pelabuhan Ratu (Jawa Barat), Kejawanan dan Pekalongan (Jawa Tengah), Tanjung Pandan (Bangk Belitung), Pemangkat (Kalimantan Barat), Tual (Maluku), Prigi (Jawa Timur), Ternate dan Ambon (Maluku).

PPN adalah pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal perikanan yang mempunyai kemampuan beroperasi di lepas pantai yang sifatnya regional dan nasional, dengan kriteria sebagai berikut :

- 2.1. Terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran 15- 60 GT
- 2.2. Melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan ZEE Indonesia dan perairan nasional.
- 2.3. Mampu menampung sekaligus 75 buah kapal perikanan atau 3.000 GT.
- 2.4. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40-50 ton/hari atau sekitar 8.000-15.000 ton/tahun.

c) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

PPP dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan tipe C atau kelas II. Terdapat 44 (empat puluh empat) PPP di Indonesia, dimana lokasinya berada di Asemtoyong, Bacan, Bajomulyo, Banjarmasin, Bawean, Blanakan, Bondet, Cilauteureun, Ciparage, Dagho, Eretan, Hantipan, Karangantu, Karimun Jawa, Kota Agung, Kupang, Kwandang, Labuhan Lombok, Labuhan Maringgai, Lampulo, Lekok, Lempasing, Mayangan, Morodemak, Muara Ciasem, Muncar,

Paiton, Pondok Dadap, Sadeng, Sikakap, Sorong, Sungai Liat, Tarakan, Tarempa, Tasik Agung,, Tawang, Tegalsari, Teladas, Teluk Batang, Tobelo, Tumumpa, Wonokerto.

PPP adalah pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal perikanan yang mempunyai kemampuan beroperasi di pantai yang sifatnya regional, dengan kriteria sebagai berikut :

- 3.1 Melayani kapal perikanan berukuran 5-15 GT.
- 3.2 Melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pantai.
- 3.3 Mampu menampung 50 buah kapal perikanan atau 500 GT sekaligus.
- 3.4 Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 15-20 ton/hari atau sekitar 3.000-4.000 ton/tahun.

d) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

PPI merupakan pelabuhan kecil yang umumnya dikelola oleh daerah, untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di daerah pantai. Terdapat 585 PPI di Indonesia, yang digunakan untuk kapal-kapal nelayan setempat untuk mendaratkan dan memasarkan hasil tangkapan, dengan kriteria sebagai berikut :

- 4.1. Melayani kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai.
- 4.2. Melayani kapal berukuran sampai dengan 10 GT.
- 4.3. Mampu menampung 20 buah kapal perikanan atau 200 GT
- 4.4. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 10 ton/hari atau 2.000 ton/tahun.

4) Lembaga

Kata lembaga secara harfiah adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan usaha. Lembaga lebih

menunjuk pada sesuatu bentuk, sekaligus juga mengandung mana yang abstrak. Karena dalam pengertian lembaga juga mengandung tentang seperangkat norma-norma, peraturan-peraturan yang menjadi ciri lembaga tersebut. Lembaga merupakan system yang kompleks yang mencangkup berbagai hal yang berhubungan dengan konsep sosial, psikologis, politik dan hukum.

Lembaga pada dasarnya adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial, serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.³⁴

Konsep umum mengenai lembaga meliputi apa yang ada pada tingkat lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, institusi-institusi, departemen-departemen di pemerintah pusat dan sebagainya. Sebuah lembaga dapat merupakan milik negara atau sektor swasta dan juga bisa mengacu pada fungsi-fungsi administrasi pemerintah.

5) Perubahan Lembaga

Menurut kamus bahasa Indonesia perubahan dapat diartikan sebagai keadaan yang berubah. Pada prinsipnya, perubahan tersebut mengarah pada perbaikan dari sesuatu yang kurang atau tidak baik menjadi baik atau dari yang lemah menjadi kuat. Dalam konteks perubahan sebuah lembaga atau organisasi,

³⁴Tony Djogo, dkk, *Bahan Ajaran 8 'Kelembgaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*, (Bogor : ICRAF, 2003), hlm. 4.

konsep perubahan (change) merupakan reformasi yang mengarah pada pergantian, baik secara fisik maupun pergantian nonfisik.³⁵

6) Kinerja

Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.³⁶

Kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi dan instansi atau unit organisasi tempat bekerja.³⁷Di dalam buku yang berjudul “Budaya dan Kinerja Organisasi” yang ditulis oleh Masana Sembiring, disana dijelaskan bahwa kinerja merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan untuk mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi.³⁸

Pengertian kinerja menurut Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 432/DPT3/OT.220.D3/I/2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, kinerja adalah hasil kerja dari instansi yang dapat diukur sesuai standar yang telah ditetapkan.

³⁵Idris H.M.Noor, “Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas”, (https://www.researchgate.net/publication/323660840_Efektivitas_Perubahan_Lembaga_Pendidikan_Tenaga_Kependidikan_LPTKInstitut_Keguruan_dan_Ilmu_Pendidikan_IKIP_menjadi_Universitas), diakses 27 Agustus 2018, 20.58 WIB)

³⁶Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja SDM* (Bandung : PT. Refika, 2005), hlm. 67.

³⁷Dalam Murphy (1990). Sudarmanto, *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi sdm*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 8.

³⁸MasanaSembiring, *Budaya dan Kinerja Organisasi*, (Bandung : Fokus Media, 2012), hlm. 81.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.³⁹

7) Operasional

Secara umum, pengertian operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran. Menurut Rhonda Abrams dan Alice Laplante, Operasional dapat diartikan sebagai aspek yang penting, karena tanpanya maka tidak ada yang dapat dikerjakan. Menurut Widjono, operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan.⁴⁰

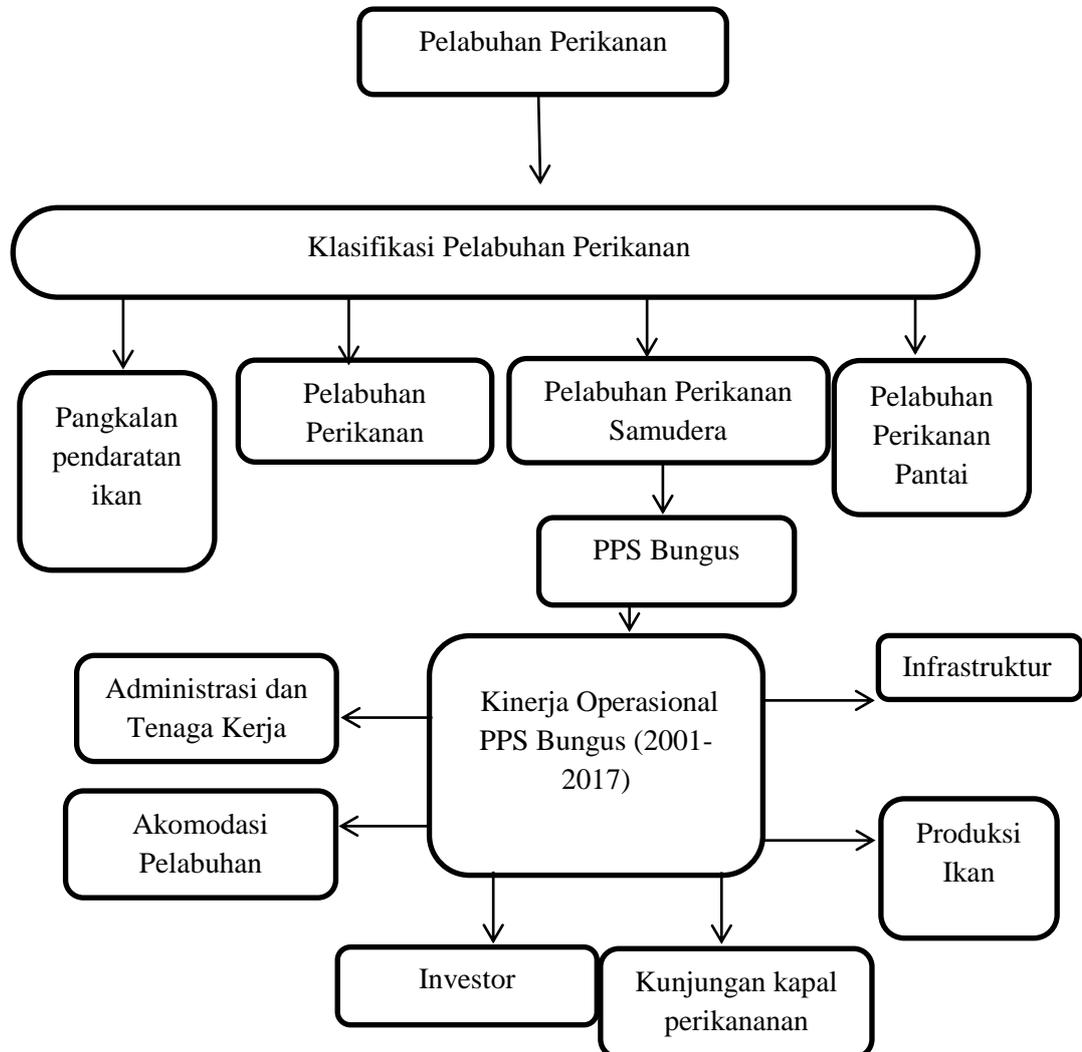
8) Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan

Secara umum kinerja operasional merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan aspek yang penting yang telah ditentukan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 432/DPT3/OT.220.D3/I/2008), kinerja operasional pelabuhan perikanan dinilai berdasarkan: administrasi pelabuhan, tenaga kerja, akomodasi peabuhan, investor, produksi ikan, kunjungan kapal perikanan dan infrastruktur

³⁹Dalam Mahmudi, *Manajemen Kinerja sektor Publik*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007). Reny Yuliasuti, "Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat", *Skripsi*(Bogor : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institusi Pertanian Bogor, 2010), hlm. 11.

⁴⁰TaniaPuteri, "Pengertian Operasional", (<https://m.kaskus.co.id/thread/57bcd3dc9a0951e61b8b456c>, diakses 27 Februari 2019, 10.46 WIB)

c. Kerangka Berpikir



F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode sejarah. Metode sejarah menurut Louis Gottschalk adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman peristiwa yang diabadikan dalam bentuk dokumen, kaset,

dan peninggalan-peninggalan masa lampau.⁴¹Metode sejarah merupakan suatu sistem dari cara-cara untuk mencapai kebenaran sejarah, selanjutnya menguji dan menganalisa kebenaran secara kritis, kemudian menyajikan suatu tulisan sejarah dengan bahasa yang baik dan benar, lugas dan ilmiah agar dapat dipahami.

Langkah-langkah dalam metode sejarah yaitu, heuristik, kegiatan yang dilakukan dalam metode ini yaitu mengumpulkan sumber-sumber. Menurut Louis Gottchalk ada dua hal penting yang harus diperhatikan seorang peneliti sejarah pada tahap heuristik, yaitu : 1. Pemilihan subjek; dan 2. Informasi tentang subjek. Proses pemilihan subjek mengacu pada empat pertanyaan pokok, yaitu di mana (aspek geografis), siapa (aspek biografis), kapan, (aspek kronologis), dan bagaimana (aspek fungsional).⁴²

Sumber yang didapatkan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapatkan dari arsip dan dokumen Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, seperti laporan tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dan Laporan statistik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang langsung penulis dapatkan dari pihak pegawai PPS Bungus yaitu Ibu Hewilda (Kepala Bagian Tata Usaha PPS Bungus). Selain itu sumber didapatkan dari data lisan, melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan staf-staf pegawai Pelabuhan Perikanan SamuderaBungus yang berjumlah 8 orang, dan pegawai PT. Danitama Mina berjumlah 1 orang

⁴¹Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta : Gramedia, 1975), hlm. 32.

⁴² Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta : Universitas Indonesia Press., 1985), hlm. 41.

Sumber yang kedua adalah sumber sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku- buku yang berkaitan dengan topik penelitian, manuskrip dan jurnal penelitian. Perpustakaan yang dikunjungi yaitu, Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Jurusan Ilmu Budaya Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Sumber yang telah diperoleh melalui tahap heuristik akan dikritik. Ada dua jenis kritik sumber yaitu kritik sumber ekstern dan kritik sumber intern. Kritik ekstern yaitu menguji keaslian (autentisitas) sumber secara fisik (material atau bahan), sedangkan kritik intern yaitu menguji keabsahan isi informasi (realibilitas) dan akurasinya dengan keadaan yang sebenarnya.

Data yang telah diseleksi melalui tahap kritik sumber, selanjutnya diinterpretasikan. Interpretasi bertujuan untuk menetapkan sejauh mana hubungan antara fakta dengan data. Hubungan antara fakta dengan data ini dapat menunjukkan secara kronologis mengenai penelitian yang akan dibuat. Dalam melakukan Interpretasi, dilakukanlah analisa antara fakta dan data sehingga menjadi suatu kesatuan kalimat yang jelas dan bermakna. Terakhir adalah penulisan sejarah, ini merupakan langkah terakhir dari penelitian sejarah. Penulisan sejarah merupakan langkah bagaimana seorang sejarawan mengkomunikasikan hasil penelitiannya untuk dibaca oleh umum. Dalam menulis sejarah berarti seorang sejarawan merokonstruksi terhadap sumber-

sumber sejarah yang telah ditemukannya menjadi suatu cerita sejarah.⁴³ Pada tahap penulisan ini dilakukan dalam bentuk skripsi sesuai dengan panduan tugas akhir Universitas Negeri Padang.

⁴³Mestika Zed, *Diktat Teori & Metodologi Sejarah*(Padang : UNP Press, 2014), hlm. 42.